

DAMPAK KONFLIK SURIAH TERHADAP HUBUNGAN RUSIA DAN TURKI

Siti Aminah¹
NIM. 1202045202

Abstract

The Syrian conflict that occurred since 2011 caused various kinds of impact for several countries involved in the conflict, two of which were Russia and Turkey. The purpose of this study is to explain the impact caused by the Syrian conflict on relations between Russia and Turkey. The type of research used is descriptive, this study uses conflict theory to explain the impact arising from the Syrian conflict on Russian and Turkish Relations. The result of this study indicates that relations between Russia and Turkey since the conflict in Syria experienced fluctuating conditions. The ups and downs of relations between Russia and Turkey occur when the two countries have different views in addressing the conflict in Syria. As a result of these different views, Russian and Turkey's relations worsened until an economic embargo was carried out by Russia for Turkey. Some sectors that are the target of the embargo include the Economy, Tourism, Construction and Energy sectors.

Keywords: *Impact of the Conflict, Syrian Conflict, Russia and Turkey, Embargo.*

Pendahuluan

Hubungan diplomatik yang terjalin antara Rusia dan Turki dimulai sejak zaman dinasti kekaisaran Tsar di Rusia dan Ottoman di Turki tepatnya di tahun 1492. Sejarah kerjasama yang pernah terjalin inilah yang mengantarkan Rusia dan Turki untuk kembali menjalin kerjasama ketika Perang Dingin telah usai lalu Rusia berdiri sebagai negara federasi.

Kerjasama yang terjalin diantara Rusia dan Turki mencakup kedalam berbagai aspek dan yang paling penting adalah kerjasama ekonomi antar kedua negara. Pembangunan proyek pipa-pipa gas dan kesepakatan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Turki menjadi salah satu alasan menguatnya hubungan ekonomi yang terjalin diantara Rusia dan Turki.

Konflik di Suriah sendiri dimulai sejak tahun 2011 dimana masyarakat Suriah yang dibantu pihak oposisi Suriah melakukan demonstrasi besar-besaran untuk

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muallwarman. E-mail : sityamhy1803@gmail.com

menggulingkan kekuasaan Bashar Al-Assad yang menjabat sebagai Presiden Suriah dan menginginkan adanya perubahan sistem kenegaraan di Suriah seperti halnya yang terjadi di negara Timur Tengah lainnya yaitu Tunisia, Mesir dan Libya. Melihat begitu banyak para demonstrasi yang melakukan aksi protesnya, membuat Assad memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan secara massif kepada para demonstran untuk menghentikan pergerakan para demonstran tersebut. Dalam aksi ini, banyak korban yang tewas hingga mencapai jumlah ribuan orang (Raisa, Rahmania, *Konflik Suriah Pasca Arab Spring 2010*).

Melihat banyaknya jumlah korban yang tewas akibat serangan tersebut, Dewan Keamanan atau DK PBB sempat mengeluarkan Draft Resolusi Nomor S/2011/612 yang isinya adalah meminta kepada Suriah untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan yang terjadi di negaranya serta diminta untuk berhenti melawan rakyatnya sendiri. Selain itu, DK PBB juga akan memonitoring konflik tersebut. Beberapa negara anggota DK PBB juga meminta untuk dilakukannya embargo senjata kepada Suriah agar tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan di Suriah dapat dikurangi (<http://www.un.org/en/ga/search/view.doc.asp?symbol=s/2011/612>).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Konflik

Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan-kesulitan diantara para pihak yang tidak sepaham. Konflik juga bisa memicu adanya sikap berseberangan (oposisi) antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan/penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing.

Menurut Kilman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (<http://download.portalgaruda.org>).

Menurut Peter Wallensteen, konflik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: konflik antar-negara (*interstate conflict*), konflik internal negara (*internal conflict*), dan konflik pembentukan negara (*state formation conflict*). Konflik antar-negara merupakan konflik yang terjadi sebagai bentuk hubungan antar-bangsa dan melewati batas-batas nasional, yang termasuk ke dalam konflik ini adalah agresi, mobilisasi, pemanggilan diplomat, nota protes, dan sebagainya. Konflik internal negara merupakan konflik yang terjadi masih di dalam wilayah sebuah negara, yang termasuk kedalam konflik ini adalah pembunuhan, kerusuhan, perang gerilya, revolusi, demonstrasi, dan sebagainya. Sedangkan konflik pembentukan negara adalah konflik yang terjadi ketika sebuah negara melepaskan diri atau memerdekakan diri (Alexius, Jermadu: *Analisis Konflik Internal dari Perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional : actor, isu, dan metodologi*).

Sumber-sumber konflik, yang merupakan tujuan utama dalam sebuah negara, antara lain:

1. Konflik kehormatan nasional
2. *Imperialism regional*: bentuk tindakan penjajahan atau penguasaan suatu wilayah tertentu.
3. Konflik pembebasan atau perang revolusioner
4. Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah atau pemersatuan suatu negara yang terpisah.

Menurut K. J. Holsti konflik memiliki sifat bilateral dengan melibatkan kekuatan militer atau ancaman militer dari pihak yang sedang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuatan militer yang berbeda-beda. Terdapat sebuah negara yang memiliki kekuatan militer yang besar ataupun sebuah negara yang memiliki kekuatan militer yang minim. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar dapat mengendalikan sebuah konflik yang terjadi di sebuah negara terlebih konflik yang sedang terjadi di negara-negara kecil untuk mendapatkan keuntungan ataupun pengaruh yang lebih luas. Dengan demikian negara yang memiliki kekuatan yang cukup besar kemungkinan besar akan terlibat dalam sebuah konflik internasional (K.J. Holsti: *International Politics: A Framework for Analysis. Third Edition.*)

Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penulis memberikan gambaran melalui data dan fakta mengenai dampak konflik Suriah terhadap hubungan Rusia dan Turki. Jenis data yang disajikan adalah data sekunder yang diperoleh penulis melalui telaah pustaka dan literatur-literatur seperti buku, internet, dan lain-lain. Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka yaitu mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif dengan metode konten menganalisa dari sumber-sumber tertulis.

Hasil Penelitian

Konflik Suriah dimulai sejak tahun 2011 ketika masyarakat Suriah melakukan aksi protesnya yang meminta Presiden Bashar Al-Assad turun dari jabatannya sebagai pemimpin Suriah. Para demonstran menuntut diadakannya revolusi dan demokratisasi di Suriah. Aksi demonstrasi yang berawal damai itu berubah menjadi ricuh ketika Bashar Al-Assad memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan kepada para demonstran hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini dijadikan kesempatan bagi para pihak oposisi untuk membantu para demonstran yang ingin menumbangkan rezim Assad. Gerakan yang awalnya hanya sebatas gerakan aksi protes masyarakat kepada pemerintah Assad, berubah menjadi perang saudara antara Pemerintah Bashar dengan pihak oposisi hingga marak terjadinya pelanggaran HAM di Suriah (<http://edition.com/2912/03/01/world/meast-syrian-crisis-beginnings/>).

Turki yang menjadi negara yang berbatasan langsung dengan Suriah memberikan perhatian khusus untuk konflik yang terjadi di Suriah. Terlihat dengan jelas bahwa Turki memberikan dukungan kepada pihak oposisi Suriah. Sedangkan Rusia yang

menjadi negara aliansi bagi Suriah juga turut memperhatikan konflik yang terjadi di Suriah dengan cara memberikan bantuan serta dukungan kepada Bashar Al-Assad untuk tetap menjadi pemimpin di Suriah.

Dinamika Hubungan Rusia dan Turki

Latar belakang sejarah hubungan Rusia dan Turki dimulai sejak zaman kekaisaran Rusia (Tsar) dan kekaisaran Turki (Ottoman). Kedua negara memiliki sejarah, budaya, dan letak geografis yang sangat kuat. Para ahli berpendapat, hubungan kedua negara dimulai sejak penandatanganan surat resmi tentang perdagangan maritim yang dikirim oleh Tsar Rusia Ivan III kepada kesultanan Ottoman Empire Bayized III di tahun 1429. Setelah peresmian penandatanganan tersebut, hubungan diplomatik resmi antara Rusia dan Turki dimulai sejak tahun 1701, ketika kedutaan besar Rusia resmi dibuka di Konstatinopel pada tahun yang sama (Oncel, Abidin: *“The Effect of Turkish-Russian Political Relations on Bilateral Trade balance: Cointegration and Causal Analysis”*).

Pada tahun 1992, Menteri Luar Negeri Turki Hikmet Cetin melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Rusia sebagai bentuk perubahan hubungan yang hendak dilakukan oleh kedua negara. Selama kunjungan ke Rusia, Hikmet Cetin melakukan kesepakatan perjanjian dengan Rusia tentang “Perjanjian Hubungan antara Republik Turki dan Federasi Rusia” dalam periode singkat di tahun 1992-1996. Ada 15 protokol yang disepakati, diantaranya ialah sains dan teknologi, pendidikan, budaya, kerjasama ekonomi serta program pertukaran angkatan bersenjata (*Ibid*).

Terlepas dari meningkatnya hubungan ekonomi diantara kedua negara, Rusia dan Turki terus bergelut dengan ketidaksepakatan dalam beberapa hal tertentu. Khususnya, Turki dan Rusia yang mendukung sisi berlawanan dalam beberapa konflik yang terjadi di beberapa negara seperti Armenia dan Israel, Armenia dan Azerbaijan dan lainnya. Rusia mengambil sikap mendukung Armenia dalam konflik Armenia dan Azerbaijan yang terjadi di tahun 1988-1994 (*Ibid*. Hal. 80). Bagi Rusia, Armenia merupakan pos penting Rusia sedangkan Turki mendukung Azerbaijan yang menjadi mitra strategisnya dalam kerjasama.

Tantangan yang lebih besar lagi terjadi ketika pecahnya Perang Chechnya periode I yang berlangsung antara Desember 1994-Agustus 1996 dan Perang Chechnya periode II yang dimulai Agustus 1999-April 2009. Rusia menuduh Turki mendukung pasukan separatis dengan mengirimkan bantuan militer ke pihak anti-pemerintah Chechnya. Selain itu, pada 16 Januari 1996 terjadi peristiwa pembajakan di feri Avrasya yang membawa 255 penumpang Rusia. Kapal tersebut dibajak hingga diambil alih oleh pasukan bersenjata Turki. Untungnya, insiden ini diselesaikan melalui negosiasi dan para pembajak menyerah tanpa adanya korban jiwa. Para pembajak tersebut telah diyakini sebagai orang-orang dari Chechnya (*Ibid*).

Selain kasus Pembajakan Feri Avrasya, pembajakan pesawat Tu-154M milik Rusia yang terbang dari Istanbul ke Moscow terjadi pada bulan Maret 2000. Pesawat milik Rusia ini dibajak oleh 3 orang Chechnya dan 4 orang kaki tangan teroris yang menyamar sebagai penumpang. Pesawat yang dijadwalkan akan terbang ke Moscow beralih jalur hingga mendarat ke Arab Saudi. Selama pembajakan pesawat tersebut seorang pramugari Rusia dan penumpang Turki tewas dalam aksi tersebut.

Pembajakan ini juga terjadi selama periode konflik Chechnya ke-2 dan hal ini membuat hubungan politik Rusia dan Turki semakin memburuk (*Ibid.* Hal. 82).

Memasuki abad ke-21, hubungan yang terjalin antara Rusia dan Turki semakin membaik terlebih saat Vladimir Putin terpilih menjadi Presiden Federasi Rusia di awal tahun 2000 serta kemenangan partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di akhir tahun 2002 yang semakin memperjelas hubungan Rusia dan Turki. Perbaikan dalam hubungan politik mulai dijalankan dan pada periode ini kedua negara sepakat untuk menghentikan persaingan politik yang terjadi antara Rusia-Turki dan menggantikannya sebagai hubungan mitra bisnis serta melakukan peningkatan kerjasama di antara kedua negara. Melalui Perdana Menteri-nya, Rusia mengklaim bahwa hubungan yang terjalin antara Rusia dan Turki bukan lagi sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra kerjasama untuk Rusia. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov dan Menteri Luar Negeri Turki Ismail Cemil sepakat menandatangani “Rencana Aksi Untuk Membangun Kerjasama antara Federasi Rusia dengan Republik Turki” pada bulan November 2001 dan memastikan juga penyelesaian kerjasama yang erat antara Rusia dan Turki dalam kawasan Eurasia.

Ketika terjadinya konflik di Suriah, Rusia dan Turki memiliki perbedaan pendapat serta pandangan dalam menyikapi konflik tersebut. Rusia menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Bashar Al-Assad untuk tetap menjadi pemimpin Suriah. Sedangkan Turki justru memiliki pandangan yang sebaliknya. Turki berpendapat Bashar Al-Assad harus turun dari kursi pemerintahan Suriah dan menyerahkan kekuasaannya ke tangan masyarakat Suriah. Hal ini dilakukan karena Turki menjadi salah satu negara tujuan bagi pengungsi masyarakat Suriah. Puncak dari perbedaan pendapat ini terjadi pada tanggal 24 November 2015 ketika pesawat tempur F-16 milik Turki menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-24. Pesawat AU Rusia ini dijadwalkan akan mendarat di Suriah. Penembakan ini terjadi di wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah tepatnya di wilayah Yayladagi, Hatay. Menurut penjelasan Mabes angkatan bersenjata Turki, pesawat AU milik Rusia telah melewati perbatasan Suriah dan sudah di peringatkan sebanyak 10 kali untuk keluar dari wilayah perbatasan tersebut sebelum Turki menembak jatuh pesawat AU Su-24 milik Rusia.

Akibat yang ditimbulkan dari insiden ini, Rusia menjatuhkan sanksi kepada dengan melakukan embargo terhadap produk makanan yang berasal dari Turki, sewaan dan penjualan tiket tur ke Turki, termasuk penghapusan charter antara Rusia dan Turki serta menanggukkan bebas visa untuk masyarakat Turki yang hendak bepergian ke Rusia (*Op. cit.* Hal. 83).

Memasuki abad ke-21, hubungan Rusia dan Turki terjalin cukup baik. Hal ini ditandai dengan terjalinnya beberapa kerjasama diantara kedua negara yang meliputi hampir di semua sector seperti ekonomi, energi, konstruksi, pariwisata hingga pemberlakuan bebas visa antara Rusia dan Turki yang terjadi di tahun 2011. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara Rusia dan Turki mengalami peningkatan yang cukup drastis dibanding hubungan kedua negara yang terjalin di masa lalu. Namun, sejak terjadinya konflik di Suriah pada tahun 2011, hubungan politik antara kedua negara mengalami

kondisi yang fluktuatif karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi antara Rusia dan Turki dalam menyikapi konflik di Suriah (*Ibid*).

Dalam teori konflik telah dijabarkan bahwa negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar cenderung ikut terlibat dalam konflik internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Rusia dan Turki ketika mereka berpihak kepada masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik Suriah. Untuk itu, penjelasan mengenai dampak konflik Suriah terhadap hubungan Rusia dan Turki akan dibagi menjadi 3 periode.

Hubungan Rusia dan Turki antara Maret 2011-Oktober 2015

Pada periode ini hubungan Rusia dan Turki sejak terjadinya konflik di Suriah di awal tahun 2011 terlihat stabil. Di tahun 2011 Rusia di pimpin oleh Dimitry Medvedev dan Turki di pimpin oleh Abdullah Gul. Di tahun ini kedua negara secara resmi memberlakukan perjalanan bebas visa selama 30 hari tepatnya terjadi di bulan Maret 2011. Selain itu, di akhir tahun 2011 dua perusahaan besar gas alam dari Rusia yaitu Gazprom dan Botas mengadakan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki yaitu Taner Yildiz. Kedua perusahaan besar Rusia itu beserta Menteri Energi Turki melakukan perpanjangan kontrak pengiriman gas dari Rusia dan Turki serta memberikan izin kepada Rusia untuk membangun pipa gas *South Stream* di dasar Laut Hitam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Turki. Selanjutnya di awal tahun 2012 Rusia dan Turki kembali membuat kesepakatan pembangunan sebuah proyek yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Akkuyu (<https://www.Hurriyetdailynews.com/calik-set-to-found-joint-venture-with-rosneft-36140>).

Selain kerjasama yang terjalin antara Rusia dan Turki, hubungan politik kedua negara mengalami perbedaan terlebih pada masalah yang terjadi di Suriah. Saat konflik di Suriah terjadi, Rusia yang menjadi negara aliansi Suriah dengan memilih untuk mendukung Bashar Al-Assad. Sedangkan Turki lebih memilih untuk mendukung pihak oposisi walau pada saat Abdullah Gul menjabat sebagai presiden, terjadi pertentangan pendapat antara Presiden Abdullah Gul dengan Menteri Luar Negeri Turki yaitu Ahmet Davutoglu. Hal ini terlihat ketika Davutoglu memberikan kritikan kepada pihak Bashar Al-Assad saat konflik yang terjadi di Suriah menimbulkan kerusakan infrastruktur hingga mengakibatkan gelombang pengungsi ke negara-negara tetangga termasuk Turki. Namun, Presiden Gul memberikan pendapat lain yang berlawanan dengan Davutoglu yang lebih menekankan pentingnya mempertahankan kepentingan nasional sebagai landasan dalam diplomasi luar negeri Turki (*Op. Cit*)

Hubungan Rusia dan Turki antara November 2015-Desember 2016

Pada periode ini posisi Abdullah Gul yang menjadi presiden Turki digantikan oleh Recep Tayyip Erdogan yang memenangkan pemilu di tahun 2014. Perbedaan pandangan yang cukup signifikan terhadap hubungan diplomatik antara Rusia dan Turki. Klimaks memburuknya hubungan Rusia dan Turki terjadi saat pesawat jet Su-24 milik Rusia ditembak jatuh oleh pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki di wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah, tepatnya di kota Yayladagi, Provinsi Hatay Turki pada tanggal 24 November 2015 pukul 09.30 pagi waktu setempat. Salah satu pilot pesawat jet Su-24 tewas dalam insiden ini.

Menurut keterangan Turki, pesawat jet Su-24 beberapa kali melintasi ujung selatan Provinsi Hatay sebelum ditembak jatuh. Selain itu, Turki juga merilis sebuah grafik mengenai pola penerbangan pesawat jet Su-24 milik Rusia. Sebelum pesawat jet Su-24 ditembak jatuh oleh pesawat F-16, Turki telah memberikan peringatan sebanyak 10 kali kepada pesawat jet tersebut untuk tidak melintasi wilayah udara Turki. Akan tetapi, menurut keterangan kapten pesawat jet Rusia yang bernama Konstantin Murakhtin, tidak ada peringatan sebelumnya dari Turki sebelum pesawat F-16 milik Turki menembak jatuh pesawat jet Su-24 milik Rusia (Henry, Etienne. 2016. "The Sukhoi Su-24 Incident Between Russia and Turkey." Jurnal Vol. IV. Switzerland. University of Neuchatel).

Akibat dari insiden ini, Rusia mengecam tindakan yang telah dilakukan oleh Turki dengan ancaman akan mengeluarkan kebijakan politik luar negeri di sektor ekonomi kepada Turki jika Turki tetap bersikeras untuk tidak meminta maaf kepada Rusia. Namun, Turki tetap pada pendiriannya dan bersikap bahwa tindakan yang dilakukan oleh angkatan udara Turki tepat karena untuk melindungi kedaulatan territorial udara Turki.

Rusia akhirnya memutuskan untuk menjalankan kebijakan politik luar negerinya yang tertuang sebagai embargo ekonomi. Embargo tersebut di putuskan secara langsung oleh Presiden Vladimir Putin dengan dikeluarkannya dekrit Presiden Rusia oleh Istana Kremlin. Presiden Vladimir Putin menandatangani dekrit No. 385 yang memutuskan untuk membuat daftar tindakan ekonomi terhadap Turki sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 November 2015 selama operasi anti-teroris di Suriah beberapa sektor yang terkena kebijakan embargo ekonomi Rusia ialah sektor ekonomi, pariwisata, konstruksi dan sektor energi (http://www.gratanet.com/uploads/user_11/files/Alert%20Russian%20Russian%20sanctions%20against%20Turkey.pdf).

Dari sektor Ekonomi, Rusia memberlakukan pelarangan impor barang-barang dari Turki seperti bahan pangan yang mencakup buah, sayuran, garam, daging, dan produk-produk pangan lainnya, produk tekstil, hingga tanaman hias (http://republika.co.id/amp_version/nym60829). Beberapa barang yang baru saja tiba di Rusia seperti produk buah dan sayuran langsung dikembalikan atau dipulangkan ke Turki. Dan tentunya hal ini berdampak buruk pada kualitas produk yang dapat membusuk saat perjalanan pulang dari Rusia menuju Turki.

Lalu di sektor pariwisata Rusia melakukan pelarangan penerbangan charter antara Rusia ke Turki, kecuali penerbangan yang dipergunakan untuk memulangkan warga Rusia yang ada di Turki. Selain itu, Rusia juga membatalkan kerjasama bebas visa antara Rusia dan Turki yang diberlakukan pada tahun 2011 lalu (*Ibid*). Selain itu, pada sektor konstruksi Rusia melakukan pembatalan secara sepihak kerjasama pembangunan dua proyek besar antara Rusia dan Turki. Dua diantaranya yang pertama adalah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Akkuyu serta proyek pembangunan jalur pipa-pipa *Truksteram* untuk menyalurkan gas alam dari Rusia menuju Turki. Kedua proyek ini dihentikan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan

(<http://economy.okezone.com/read/2015/12/02/320/1259592/stop-perdagangan-cara-rusia-balas-dendam-ke-turki>)

Sektor selanjutnya adalah sektor Energi. Dalam sektor ini Rusia memotong sedikit jumlah ekspor ke Turki yang awalnya 27,01 miliar meter kubik, menjadi 24,76 miliar meter kubik. Rusia sengaja memotong sedikit jumlah ekspor gas alam yang akan dikirim ke Turki karena jika Rusia memotong jumlah ekspor gas alam lebih banyak ke Turki, hal tersebut akan mempengaruhi PDB Rusia(<http://www.gazpromeexport.ru/en/statistics/>)

Tepat 7 bulan setelah kebijakan embargo ekonomi untuk Turki di berlakukan oleh Rusia, Presiden Turki yaitu Erdogan secara resmi meminta maaf kepada Rusia atas insiden krisis jet yang menewaskan salah satu pilot pesawat tersebut. Presiden Erdogan juga meminta kepada Rusia untuk menghentikan kebijakan embargo kepada negaranya setelah Turki mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar sekitar 10 miliar US Dollar.

Hubungan Rusia dan Turki antara Januari 2017-Desember 2018

Pada periode ini hubungan Rusia dan Turki kembali membaik pasca insiden besar yang membuat hubungan Rusia dan Turki sempat mengalami masa krisis. Di tahun 2017 kedua negara sepakat untuk membahas secara damai konflik di Suriah dengan keberhasilan Rusia dan Turki yang menyusun kebijakan bersama dalam menangani konflik di Suriah. Rusia dan Turki akan melakukan gencatan senjata nasional di Suriah dan bersiap melakukan negosiasi damai dengan mempertemukan Bashar Al-Assad dengan pihak oposisi guna mencari titik temu dalam menangani masalah di Suriah. Negosiasi ini dilakukan di Astana, Kazakhstan dengan pihak penjamin dalam kesepakatan ini ialah Rusia dan Turki. Selain itu, Rusia dan Turki juga akan membuka jalan negosiasi bagi pihak yang sedang berperang(http://id.dbth.com/news/2017/01/03/kecewa/dengan/nato/turki/pilih/kerja/sama/dengan/moscow_674281).

Di tahun yang sama, Presiden Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Ankara untuk melakukan perbincangan mengenai konflik di Suriah serta isu-isu lain yang mendorong kedua belah pihak untuk mengesampingkan perbedaan diantara mereka. Selain perbincangan mengenai isu Suriah dan isu lainnya, proyek *Trukstream* di Laut Hitam dan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir berhasil dijalankan kembali. Pelarangan impor barang-barang dari Turki dan juga ekspor gas alam yang sempat di kurangi, dikembalikan seperti semula. Di tahun ini perekonomian Turki kembali stabil(*Op. Cit*).

Selain itu, Rusia dan Turki juga berhasil membuat kesepakatan mengenai jual-beli sistem anti-rudal S300 buatan Rusia. Kesepakatan pembelian sistem anti-rudal milik Rusia ini telah dibicarakan oleh kedua negara saat Presiden Erdogan berkunjung ke kediaman pribadi Putin di kota Sochi. Walaupun jual-beli sistem anti-rudal Rusia dikecam oleh NATO dan Amerika Serikat, Turki tetap melanjutkan kerjasama ini dengan Rusia untuk memperbaiki hubungan keduanya yang sempat memanas di akhir tahun 2015 hingga di tahun 2016(<http://www.globe.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4047688.html>).

Selain jual-beli sistem anti-rudal S300, di tahun 2018 Rusia dan Turki juga sepakat untuk melakukan transaksi jual-beli sistem anti-rudal S400. Selain itu, Rusia juga membangun kerjasama militer untuk mencegah serta menghentikan pergerakan dari kelompok-kelompok militan yang mengganggu keamanan internasional. Salah satu kelompok militan yang hendak ditumpas oleh keduanya ialah kelompok ISIS yang memiliki basis di kedua negara yaitu Iraq dan Suriah. Turki juga berencana untuk mengusir kelompok ISIS di wilayah Rawwa, Suriah untuk menciptakan perbatasan antara Turki dan Suriah sebagai zona aman (<http://www.republika.co.id/amp/ommxzx383>).

Kesimpulan

Konflik di Suriah yang dimulai sejak tahun 2011 banyak mengakibatkan perpecahan dan marak terjadinya pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Dengan terganggunya kestabilan perdamaian di Suriah membuat negara-negara besar serta negara-negara yang berdekatan dengan Suriah turut untuk menyelesaikan dan mengembalikan stabilitas perdamaian di wilayah tersebut. Diantara negara-negara yang turut andil dalam konflik tersebut ialah Rusia dan Turki yang terlihat begitu gencar peranannya dalam konflik di wilayah tersebut. Akibatnya, keikutsertaan kedua negara tersebut dalam menangani konflik Suriah justru berujung pada memburuknya hubungan antara Rusia dan Turki akibat dari konflik tersebut. Rusia sempat melakukan embargo ekonomi terhadap Turki yang merupakan hasil dari tindakan gegabah Turki yang menembak pesawat tempur Rusia di wilayah perbatasan antara Suriah dan Turki. Dampak yang ditimbulkan oleh aksi tersebut membuat ekonomi Turki menurun karena sebagian besar hasil bumi Turki di ekspor ke Rusia. Selain Turki yang merasakan dampak embargo tersebut, Rusia juga mengalami kerugian besar karena Turki merupakan salah satu negara terbesar yang mengeksplor gas alam dari Rusia.

Namun, di tahun 2016, Turki menyerah dan menyatakan permintaan maafnya atas insiden penembakan pesawat tersebut serta meminta Rusia untuk mencabut embargo tersebut hingga akhirnya hubungan yang terjadi diantara kedua negara kembali membaik.

Daftar Pustaka

Buku

Akexius, Jermadu. 2007. *“Analisis Konflik Internal dari Perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: actor, isu dan metodologi.”* Bandung. Graha Ilmu.

K.J. Holsti. 1976. *“International Politics: A Framework for Analysis. Third Edition”*. Vancouver. British Columbia. Easterns Economy Edition.

Jurnal

Raisa. Rahchmania. 2015. *“Konflik Suriah Pasca Arab Spring 2010.”* Jakarta. Universitas Syarif Hidayatullah.

Oncel, Abidin. 2018. *“The Effects Turkish-Russian Political Relations on Bilateral Trade Balance: Cointegrations and Causal Analysis.”* Turkey. Sakarya University.

Henry, Etienne. 2016. *“The Sukhoi Su-24 Incident Between Russia and Turkey.”* Jurnal Vol. IV. Switzerland. University of Neuchatel. Hal. 10

Media Online

“Alert Russian Sanctions Against Turkey.” Grata Internasional.” Terdapat di http://www.gratanet.com/uploads/user_11/files/Alert%20Russian%20sanctions%20against%20Turkey.pdf

“Calik set to Find Joint Venture with Rosneft.” Terdapat di <http://www.hurriyetdailynews.com/calik-set-to-found-joint-venture-with-rosneft-36140>

“Deera: The Spark That Lit the Syrian Flame.” Terdapat di <http://edition.com/2912/03/01/world/meast-syrian-crisis-beginnings/>

“Hubungan Rusia-Turki Menghangat, Putin akan Kunjungi Ankara.” Terdapat di <http://www.globe.com/amp/s.www.voaindonesia.com/amp/4047688.html>

“Kecewa dengan NATO, Turki Pilih Kerjasama dengan Moscow.” Terdapat di http://id.rbth.com/news/2017/01/03/kecewa-dengan-nato-turki-pilih-kerjasama-dengan-moscow_674281

Official Website Gazprom <http://www.gazpromeexport.ru/en/statistics/>

Stop Perdagangan, Cara Rusia Balas Dendam ke Turki.” Terdapat di <http://economy.okezone.com/read/2015/12/02/320/1259592/stop-perdagangan-cara-rusia-balas-dendam-ke-turki>

“Turis dan Pengusaha Turki di Rusia Jadi Korban.” Terdapat di http://www.republika.co.id/amp_version/nym60829

“Turki Jalin Kerjasama Militer dengan Rusia.” Terdapat di <http://www.republika.co.id/amp/ommxzx383>